

PELAKSANAAN *E-BUDGETING* DALAM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Gusti Ayu Wike Putri ¹⁾, Priyanto ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: wike2787@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pencapaian output *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja organisasi daerah di Kota Surabaya, serta kelemahan sistem *e-Budgeting*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teori penyusunan anggaran menurut Munandar (2015:18) dan panduan pencapaian output pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja organisasi perangkat daerah, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/237/436.1.2./2019 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa analisis pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja dilaksanakan melalui langkah-langkah, yaitu pengumpulan data, pengolahan data untuk menyusun budget yang diinginkan, menyusun budget sementara, mendiskusikan budget sementara yang sudah disusun, menyusun budget definitif, pengumpulan data untuk evaluasi, serta mengolah dan menganalisis data-data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan. Pencapaian output pelaksanaan sistem *e-Budgeting* tersebut yaitu output anggaran kegiatan sudah riil dan sudah menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan OPD-OPD secara langsung, Rincian Output (RO) anggaran program kerja OPD-OPD sudah sangat spesifik dan mencerminkan tugas dan fungsi OPD-OPD yang menghasilkannya, Satuan Rincian Output (RO) sudah sama dengan satuan KRO (Klasifikasi Rincian Output), Rincian Output (RO) pada penyusunan anggaran program kerja bersifat tidak terbuka sehingga Pemkot Surabaya dan OPD-OPD tidak dapat menyusun dan mengubah nomenklatur RO secara mandiri karena untuk merubah rincian output harus melalui pembahasan bersama TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kelemahan dari sistem *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja OPD pada pemerintah Kota Surabaya, yaitu adanya perubahan kebijakan yang berlaku untuk sebagian, penggunaan beberapa aplikasi satelit yang belum terintegrasi dengan sistem *e-Budgeting* dan adanya *massive data loading*. Kemudian solusi atas kelemahan tersebut yaitu: (1) Perlunya selalu memastikan penyesuaian algoritma eksepsi tersebut b) tidak mempengaruhi algoritma dasar *e-Budgeting*, (2) Perlunya penyeragaman format aplikasi satelit sehingga terstandar dengan format *e-Budgeting* untuk memudahkan proses integrasi, (3) perlunya terus dilakukan upgrading infrastruktur baik secara hardware dan software untuk mendukung proses yang terjadi pada aplikasi *e-Budgeting* juga dilakukan pengembangan aplikasi *e-Budgeting* 2.0. Peneliti menyusun rekomendasi, yaitu hendaknya BPKAD Surabaya: (1) Selalu memastikan penyesuaian algoritma eksepsi tersebut tidak mempengaruhi algoritma dasar *e-Budgeting*, (2) Melakukan penyeragaman format aplikasi satelit sehingga terstandar dengan format *e-Budgeting* untuk memudahkan proses integrasi, dan (3) Terus melakukan upgrading infrastruktur baik secara hardware dan software untuk mendukung proses yang terjadi pada aplikasi *e-Budgeting* juga dilakukan pengembangan aplikasi *e-Budgeting* 2.0.

Kata Kunci: *e-Budgeting*, Pelaksanaan Program Kerja, Organisasi Perangkat Daerah

Abstract

This research aims to find out the implementation and achievement of e-Budgeting outputs in the preparation of work programs of regional organizations in Surabaya City, as well as the weaknesses of the e-Budgeting system. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach, using the theory of budget preparation according to Munandar (2015: 18) and guidelines for achieving the output of e-Budgeting implementation in the preparation of work programs of regional apparatus organizations, based on the Decree of the Mayor of Surabaya Number: 188.45/ 237/436.1.2./2019 concerning the Standard Unit

Price of Regional Expenditure of Surabaya City for the 2020 Budget Year. This data collection was carried out through observation, interviews, and document studies. Data analysis uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results found that the analysis of the implementation of e-Budgeting in the preparation of work programs was carried out through steps, namely data collection, data processing to compile the desired budget, compile a temporary budget, discuss the temporary budget that has been compiled, compile a definitive budget, collect data for evaluation, and process and analyze the data to get conclusions. The achievement of the output of the implementation of the e-Budgeting system is that the output of the activity budget is real and has described the achievement of the OPD-OPD activity targets directly, the Output Details (RO) of the OPD-OPD work program budget are very specific and reflect the duties and functions of the OPD-OPD that produce them, The unit of Output Details (RO) is the same as the KRO unit (Classification of Output Details), Output Details (RO) in the preparation of work program budgets are not open so that the Surabaya City Government and OPDs cannot compile and change RO nomenclature independently because to change output details must go through discussions with TAPD or the Local Government Budget Team. The weaknesses of the e-Budgeting system in the preparation of OPD work programs in the Surabaya City government, namely changes in policies that apply to some, the use of several satellite applications that have not been integrated with the e-Budgeting system and the massive data loading. Then the solutions to these weaknesses are: (1) The need to always ensure that the adjustment of the exception algorithm does not affect the basic e-Budgeting algorithm, (2) The need for uniformity of satellite application formats so that they are standardized with the e-Budgeting format to facilitate the integration process, (3) The need to continue upgrading infrastructure both in hardware and software to support the processes that occur in the e-Budgeting application as well as the development of the e-Budgeting 2.0 application. Researchers made recommendations, namely BPKAD Surabaya should: (1) Always ensure that the adjustment of the exception algorithm does not affect the basic e-Budgeting algorithm, (2) Uniformize the format of satellite applications so that they are standardized with the e-Budgeting format to facilitate the integration process, and (3) Continue upgrading the infrastructure both in hardware and software to support the processes that occur in the e-Budgeting application as well as the development of the e-Budgeting 2.0 application.

Keywords: *e-Budgeting, Work Program Implementation, Regional Apparatus Organization*

A. LATAR BELAKANG

Sistem *e-Budgeting* merupakan suatu sistem penyusunan anggaran dalam jajaran Pemkot Surabaya, dimana dalam menyusun anggaran dibutuhkan komponen-komponen penyusunan dengan penentuan harga yang didasarkan pada hasil survei di lapangan. Dengan begitu maka, harga anggaran yang ditentukan tidak jauh berbeda dengan harga nyata di pasaran. Komponen penyusun *e-Budgeting* terdiri dari tiga jenis pengelompokan, yaitu SHSD (Standar Harga Satuan Dasar), Harga HSPK (Satuan Pokok Kegiatan), dan SAB (Standar Analisa Belanja). Sistem *e-Budgeting* dikelola secara online supaya bisa diakses oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di manapun lokasi OPD tersebut dan juga bisa diakses kapan saja, terutama sewaktu proses pembahasan rancangan anggaran dilaksanakan bersama dengan DPRD.

Dalam sistem *e-Budgeting* Pemkot Surabaya, terdapat fitur-fitur yang meliputi

pembuatan komponen-komponen penyusun, penyusunan anggaran, pengiriman rincian anggaran, evaluasi anggaran, daftar harga, daftar penyusun komponen, rekap anggaran, *history* rincian anggaran, dan *setting* kode rekening komponen penyusun anggaran.

Tujuan penggunaan *e-Budgeting* adalah untuk meningkatkan kualitas APBD ditinjau dari aspek kesesuaian dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), keakuratan nilai dan rekening, dan akuntabilitas dari alokasi belanja. Kemudian, manfaat dari sistem *e-Budgeting* ini adalah prosesnya transparan, proses penyusunan menjadi lebih efektif dan efisien, anggaran sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan, kejelasan kronologis anggaran dan laporan-laporan sesuai kebutuhan bisa terpenuhi dengan mudah. Selain itu, keuntungan dari penggunaan *e-Budgeting* tersebut adalah:

1. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran menjadi lebih pendek atau singkat.
2. Harga satuan komponen anggaran diantara organisasi perangkat daerah telah memakai standar harga yang sama.
3. Rekap anggaran tiap rekening belanja bisa dilihat secara *real time*.

Penggunaan sistem *e-Budgeting* memiliki kelebihan yaitu dalam melaksanakan perencanaan anggaran bagi semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Surabaya beserta pemantauan atau pengawasannya menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif serta mudah saat mencari data yang diperlukan kapan saja, dari mana saja. Walaupun begitu, sistem *e-Budgeting* tersebut memiliki kekurangan yaitu karena *e-Budgeting* ini *flexible* penggunaannya, sehingga jika bermaksud melakukan perubahan kapanpun menjadi mudah. Dengan mudahnya melakukan perubahan tersebut setelah tahun anggaran berjalan, sehingga terlihat perencanaan anggaran di awal menjadi terkesan tidak matang, padahal sebenarnya terkadang perubahan itu untuk menambah nilai output tetapi tidak menambah biaya karena perubahan tersebut.

B. LANDASAN TEORITIS

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penyusunan anggaran menurut Munandar (2025) dan pencapaian *output* pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/237/436.1.2./2019 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020.

C. METODE

Sesuai dengan objek penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian, teknis analisis

data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pelaksanaan *e-Budgeting* dalam Penyusunan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya

Dari hasil penelitian atas analisa pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya, diperlukan beberapa langkah yang diikuti dalam penganggaran, yaitu:

- a) Data internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran dilaksanakan melalui usulan dari OPD yang dimulai dari tahap perencanaan yang prosesnya melalui sistem *e-planning* untuk kemudian diintegrasikan dengan sistem *e-Budgeting* untuk proses penganggarannya hingga menghasilkan output penganggaran yang dibutuhkan.
- b) Pengolahan data dan informasi untuk menyusun anggaran program kerja yang diinginkan. berdasarkan usulan dari OPD yang mana didalamnya tercantum program dan prioritas yang mendukung baik prioritas nasional maupun Pemerintah Kota Surabaya.
- c) Menyusun budget sementara berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi yang telah dilakukan dilakukan melalui usulan dari OPD tersebut sebelum dilakukan pengesahan terlebih dahulu dilakukan pembahasan atas usulan tersebut untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan telah sesuai dengan program dan prioritas anggaran dan kebutuhan.
- d) Melaksanakan diskusi pembahasan terhadap budget sementara yang telah disusun dengan cara mengadakan diskusi bersama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) atas budget sementara OPD-OPD yang telah disusun.
- e) Menyusun budget definitif berdasarkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil diskusi yang telah

diselenggarakan dengan mendampingi dan mengawal OPD untuk dapat melakukan proses entri pada aplikasi *e-Budgeting* sesuai dengan usulan yang telah disepakati bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

- f) Pengumpulan data untuk keperluan evaluasi atas realisasi pelaksanaan budget jajaran OPD dengan membandingkan anggaran dan realisasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penyusunan anggaran berikutnya.
- g) Mengolah dan menganalisis data-data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan untuk mengevaluasi realisasi pelaksanaan anggaran, yang dilanjutkan dengan menyusun kebijakan-kebijakan tindak lanjutnya.

Dalam proses penyusunan anggaran dari program kerja diperlukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebagaimana dalam pembahasan di atas sudah sesuai yang dikemukakan dalam teori penyusunan program kerja, yang melalui langkah-langkah penyusunannya yaitu pengumpulan data, pengolahan data untuk menyusun budget yang diinginkan, menyusun budget sementara, mendiskusikan budget sementara yang sudah disusun, menyusun budget definitif, pengumpulan data untuk evaluasi serta mengolah dan menganalisis data-data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.

2. Pencapaian Komponen Pendukung Output Pelaksanaan *e-Budgeting* dalam Penyusunan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui Rincian Output (RO) pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja OPD atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya, meliputi:

- a) Penentuan nomenklatur Output anggaran program kerja OPD-OPD terkait nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah didasarkan pada

Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/237/436.1.2./2019 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020.

- b) Dalam menentukan nomenklatur Output yang menggambarkan fokus/locus atas program kerja OPD-OPD berdasarkan pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/237/436.1.2./2019 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020.
- c) Output anggaran kegiatan sudah riil dan sudah menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan OPD-OPD secara langsung.
- d) Rincian Output (RO) anggaran program kerja OPD-OPD sudah sangat spesifik dan mencerminkan tugas dan fungsi OPD-OPD yang menghasilkannya.
- e) Satuan Rincian Output (RO) sudah sama dengan satuan KRO (Klasifikasi Rincian Output) pada penyusunan anggaran program kerja OPD-OPD.
- f) Rincian Output (RO) pada penyusunan anggaran program kerja OPD-OPD bersifat tidak terbuka sehingga Pemkot Surabaya dan OPD-OPD tidak dapat menyusun dan mengubah nomenklatur RO secara mandiri karena untuk merubah rincian output harus melalui pembahasan Bersama TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pencapaian Rincian Output (RO) di atas sudah dilaksanakan sejalan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/237/436.1.2./2019 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020.

3. Kelemahan Sistem *e-Budgeting* dalam Penyusunan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya serta Alternatif Solusinya

Berdasarkan hasil penelitian terkait kelemahan sistem *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja OPD Pemkot

Surabaya, ditemukan terdapat beberapa kelemahan dari sistem *e-Budgeting* ini, yaitu:

a) Perubahan Kebijakan yang Berlaku untuk Sebagian

Fungsi dikembangkannya aplikasi *e-Budgeting* (berserta aplikasi pendukung keuangan lainnya) adalah untuk menstandarisasi baik proses, alur serta item penganggaran bagi seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem proses penganggaran yang seragam sehingga meningkatkan efisiensi, efektifitas serta menekan praktek KKN karena semua kegiatan dilakukan dalam parameter yang telah ditentukan pada algoritma sistem. Namun pada beberapa case, kondisi baik politik, ekonomi dan banyak hal lainnya mengharuskan aplikasi menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang berlaku hanya untuk sebagian (eksepsi) pengguna dalam hal ini PD. Munculnya kebijakan yang mempengaruhi baik proses, alur maupun item penganggaran ini terkadang sangat sering dilakukan sehingga penyesuaian algoritma untuk eksepsi kerap kali dilakukan.

Alternatif solusinya yaitu hendaknya selalu memastikan penyesuaian algoritma eksepsi tersebut tidak mempengaruhi algoritma dasar *e-Budgeting* dan sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya *privilege* pada pengguna tertentu. Penyesuaian aplikasi karena kebijakan yang fluktuatif selalu melewati kesepakatan pengampu berbagai aplikasi yang terkait sehingga tidak mengganggu ekosistem penganggaran.

b) Penggunaan Beberapa Aplikasi Satelit yang Belum Terintegrasi dengan Sistem *e-Budgeting*

Aplikasi *e-Budgeting* merupakan kertas kerja proses Perencanaan Anggaran yang paling detail merangkum rincian anggaran sampai dalam tingkat komponen (item). Namun seiring

berkembangnya ekosistem digital di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, muncul berbagai aplikasi satelit yang melakukan proses perencanaan pekerjaan dalam lingkup khusus sebelum nantinya akan dimuarakan pada aplikasi *e-Budgeting*. Satu sisi aplikasi satelit tersebut memberikan keuntungan karena fokus pada satu sektor permasalahan atau tujuan, namun disisi lain aplikasi satelit tersebut belum terintegrasi penuh dengan *e-Budgeting* dan memiliki formatting yang berbeda sehingga pada saat penarikan data data krusial dari aplikasi satelit tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit

Solusinya yaitu penyeragaman format aplikasi satelit sehingga terstandar dengan format *e-Budgeting* untuk memudahkan proses integrasi. Melakukan evaluasi beberapa aplikasi untuk penyederhanaan proses dan meminimalisir jumlah aplikasi yang berjalan.

c) Adanya *Massive Data Loading*

Masih berkembangnya infrastruktur digital dan juga aplikasi itu sendiri yang ada baik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maupun di BPKAD khususnya tidak selaras dengan meningkatnya jumlah data yang harus diolah setiap tahunnya sehingga terkadang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses data terutama untuk PD dengan anggaran besar.

Alternatif solusinya yaitu hendaknya terus dilakukan *upgrading* infrastruktur baik secara *hardware* dan *software* untuk mendukung proses yang terjadi pada aplikasi *e-Budgeting* juga dilakukan pengembangan (develop) aplikasi *e-Budgeting* 2.0 yang menggunakan teknologi bahasa pemrograman terbaru sehingga lebih fleksibel dan mumpuni.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui langkah-langkah penyusunannya, yaitu pengumpulan data, pengolahan data untuk menyusun budget yang diinginkan, menyusun *budget* sementara, mendiskusikan *budget* sementara yang sudah disusun, menyusun *budget* definitif, pengumpulan data untuk evaluasi serta mengolah dan menganalisis data-data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.
- b) Pencapaian *output* pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Surabaya yaitu menentukan nomenklatur Output anggaran dan fokus program kerja terkait nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah didasarkan pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/237/436.1.2./2019 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020, Output anggaran kegiatan sudah riil dan sudah menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan OPD-OPD secara langsung, Rincian Output (RO) dimana anggaran program kerja OPD-OPD sudah sangat spesifik dan mencerminkan tugas dan fungsi OPD-OPD yang menghasilkannya, satuan Rincian Output (RO) sudah sama dengan satuan KRO (Klasifikasi Rincian Output), Rincian Output (RO) pada penyusunan anggaran program kerja bersifat tidak terbuka sehingga Pemkot Surabaya dan OPD-OPD tidak dapat menyusun dan mengubah nomenklatur RO secara mandiri karena untuk merubah rincian output harus melalui pembahasan

bersama TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- c) Kelemahan pelaksanaan *e-Budgeting* dalam penyusunan program kerja OPD pada pemerintah Kota Surabaya, yaitu adanya perubahan kebijakan yang berlaku untuk sebagian, penggunaan beberapa aplikasi satelit yang belum terintegrasi dengan sistem *e-Budgeting* dan adanya *massive data loading*. Kemudian solusi atas kelemahan tersebut yaitu:
 - 1) Perlunya selalu memastikan penyesuaian algoritma eksepsi tersebut.
 - 2) Tidak mempengaruhi algoritma dasar *e-Budgeting*.
 - 3) Perlunya penyeragaman format aplikasi satelit sehingga terstandar dengan format *e-Budgeting* untuk memudahkan proses integrasi.
 - 4) Perlunya terus dilakukan *upgrading* infrastruktur baik secara *hardware* dan *software* untuk mendukung proses yang terjadi pada aplikasi *e-Budgeting* juga dilakukan pengembangan aplikasi *e-Budgeting* 2.0.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi diantaranya:

- a) Hendaknya BPKAD Surabaya selalu memastikan penyesuaian algoritma eksepsi tersebut tidak mempengaruhi algoritma dasar *e-Budgeting* selalu memastikan penyesuaian algoritma eksepsi tersebut tidak mempengaruhi algoritma dasar *e-Budgeting*.
- b) Hendaknya BPKAD Surabaya melakukan penyeragaman format aplikasi satelit sehingga terstandar dengan format *e-Budgeting* untuk memudahkan proses integrasi
- c) Hendaknya BPKAD Surabaya terus melakukan *upgrading* infrastruktur baik secara *hardware* dan *software* untuk

mendukung proses yang terjadi pada aplikasi *e-Budgeting* juga dilakukan pengembangan aplikasi *e-Budgeting* 2.0.

REFERENSI

- Abdul, H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, Y. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bintoro, T. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Catur, S., & Safrida, R. (2011). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dominic, S., & Haris, M. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Habibullah, A. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23(3), 228–245.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hansen, D. R., & Maryanne, M. M. (2009). *Managerial Accounting: Akuntansi Manajerial*. Dialih bahasakan oleh Deny Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.
- Hetzer, E. (2012). *Central and Regional Government*. Jakarta: Gramedia.
- Husein, U. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartono. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.
- Kasiyanto, A., & Budi, S. (2013). Kebijakan Sistem Pemerintahan E-Government di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1), 1–20.
- Kauvar, G. (1998). *Electronic Government: Concepts, Visions, and Strategies*. The KAPAs International Symposium On Electronic Government: Visions and Strategies. Seoul: Korea.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muindro, R. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press. Group.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar. (2015). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Nafarin, M. (2000). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, H. (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, H. (2005). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Press.
- Nordiawan, D., & dan Ayuningtyas, H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyatno, D. (2009). *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Putra, E. J. (2015). *Pengelolaan Kepegawaian Pada Era Otonomi*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 6(5), 37–60.
- Rahman, et al., (2018). Analisis Implementasi E-Budgeting Dengan Menggunakan Model CIPP Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, 14(2), 147–160.
- Rizka, K., et al. (2017). *Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance*. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)*, 3(2), 249–256.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Sudirman, M. Y. D., Kusuma, D. T., & Fitriani, Y. (2020). Pendekatan e-Budgeting Untuk Pemantauan Anggaran Perjalanan Dinas. *Petir*, 14(1), 52–60.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Semarang.
- Tawazan, B. (2022). *Panduan Perencanaan dan Penganggaran*. Seri 2 Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, Volume I, Nomor (1)*, 1–16.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.